

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: STUDI DI DESA NANGA
WERA KABUPATEN BIMA**

Information Author	Abstract
<p>Firdaus Universitas Mbojo Bima Email: firddaus08@gmail.com</p> <p>Syahri Ramadoan Universitas Mbojo Bima Email: syahriird@gmail.com</p> <p>Akhyar Universitas Mbojo Bima Email: ahyarmbozo8@gmail.com</p>	<p>This study aims to examine the role of village heads in building awareness and increasing community compliance with the obligation to pay Land and Building Tax (PBB) in Nanga Wera Village. This study uses a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The analysis focuses on the fiscal communication strategies and extension models implemented by the village head, as well as on how these interactions shape residents' responses. The study's results show that counseling by village heads, delivered through both formal and informal forums, increases fiscal awareness. In its implementation, the effectiveness of socialization is hampered by the lack of support from formal tax officials, the absence of visual media, and limited administrative capacity. Village heads play a dual role as policy communicators and fiscal educators, even without adequate technical support. Discussions with community leaders helped shape social tax norms, but they were still elitist and uneven. The unaffordability of visual information reinforces the fiscal literacy inequality between citizens. These findings emphasize the importance of collaboration between villages and tax authorities in creating a more adaptive and sustainable socialization system. This research enriches the study of public administration by emphasizing the importance of a locally led approach to building a culture of fiscal compliance in rural areas.</p> <p>Keywords: <i>Land and Building Tax, Village Head, Tax Socialization, Fiscal Compliance, Village Government, Tax Literacy, Public Administration</i></p> <p>تهدف هذه الدراسة إلى دراسة دور رؤساء القرى في بناء الوعي وزيادة التزام المجتمع بدفع ضريبة الأراضي والمباني (PBB) في قرية نانغا ويرا. تستخدم هذه الدراسة نهجا وصفيا نوعيا من خلال جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة، وملاحظات تشاركية، ودراسات توثيق. يركز التحليل على استراتيجيات التواصل المالي ونماذج التمديد التي ينفذها رئيس القرية، بالإضافة إلى كيفية تشكل استجابة السكان كنتيجة لهذه التفاعلات. تظهر نتائج الدراسة أن الاستشارات التي يقدمها رؤساء القرى، سواء من خلال المنتديات الرسمية أو غير الرسمية، تساهم في زيادة الوعي المالي. في تنفيذها، تعيق فعالية التنشئة الاجتماعية نقص الدعم من مسؤولي الضرائب الرسميين، وغياب وسائل الإعلام البصرية، ومحدودية</p>

القدرة الإدارية. يلعب رؤساء القرى دورا مزدوجا كمتواصلين سياسيين وكذلك كمتقنين ماليين، حتى بدون دعم فني كاف. ساعدت المناقشات مع قادة المجتمع في تشكيل معايير الضرائب الاجتماعية، لكنها كانت لا تزال نخبوية وغير متكافئة. عدم القدرة على تحمل المعلومات البصرية يعزز عدم المساواة في الثقافة المالية بين المواطنين. تؤكد هذه النتائج على أهمية التعاون بين القرى والسلطات الضريبية في خلق نظام اجتماعي أكثر تكيفا واستدامة. تنبئ هذه الأبحاث دراسة الإدارة العامة من خلال التأكيد على أهمية النهج القائم على القيادة المحلية في بناء ثقافة الامتثال المالي في المناطق الريفية.

الكلمات المفتاحية: ضريبة الأراضي والمباني، رئيس القرية، التمس الضريبي، الامتثال المالي، حكومة القرية، الثقافة الضريبية، الإدارة العامة

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepala desa dalam membangun kesadaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Nanga Wera. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Fokus analisis diarahkan pada strategi komunikasi fiskal dan model penyuluhan yang dijalankan oleh kepala desa, serta bagaimana respons warga terbentuk sebagai implikasi dari interaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan kepala desa, baik melalui forum formal maupun informal, berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran fiskal. Dalam pelaksanaannya, efektivitas sosialisasi terhambat oleh minimnya dukungan dari aparat pajak formal, ketiadaan media visual, dan keterbatasan kapasitas administratif. Kepala desa berperan ganda sebagai komunikator kebijakan sekaligus pendidik fiskal, meskipun tanpa dukungan teknis yang memadai. Diskusi dengan tokoh masyarakat turut membantu membentuk norma sosial pajak, tetapi masih bersifat elitis dan tidak merata. Ketidakterjangkauan informasi visual memperkuat ketimpangan literasi fiskal antarwarga. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara desa dan otoritas pajak dalam menciptakan sistem sosialisasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis kepemimpinan lokal dalam membangun budaya kepatuhan fiskal di perdesaan.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Desa, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Fiskal, Pemerintahan Desa, Literasi Pajak, Administrasi Publik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan utama dalam pembangunan nasional dan daerah, memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung pemerataan kesejahteraan sosial. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki signifikansi tersendiri karena berbasis objek tetap yang secara langsung berkaitan dengan hak milik warga atas tanah dan bangunan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, PBB berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya, terutama di wilayah perdesaan (Abdullah et al., 2022; Senawi & Osmadi, 2023; Zulkifli et al., 2021). Peningkatan penerimaan pajak properti memungkinkan pemerintah lokal melakukan investasi pada barang publik dan layanan sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah (Zulkifli et al., 2021).

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PBB di tingkat desa belum mencapai titik ideal. Di berbagai daerah, pemungutan PBB masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas administrasi, lemahnya sistem penilaian aset yang akurat, hingga terbatasnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah lokal (Abdullah et al., 2022; Senawi et al., 2022). Tingkat informalitas ekonomi yang tinggi, jarak geografis dari pusat pelayanan pajak, dan rendahnya literasi fiskal masyarakat desa turut memperumit upaya penegakan pajak (Ahmadu & Nukpezah, 2022; Hariandja, 2020). Bahkan, praktik perpajakan modern masih sering dipandang asing dalam tatanan nilai masyarakat agraris, sehingga berpotensi menciptakan resistensi kultural terhadap kewajiban pajak formal (Chen, 2022).

Menjawab kompleksitas ini, kepala desa di Indonesia memegang posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan perpajakan lokal. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik, termasuk di dalamnya kewajiban fiskal warga (Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa, 1988; Soeharto, 2002). Dalam kerangka administrasi fiskal lokal, otoritas desa diberi kewenangan untuk menilai objek PBB, mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta menginformasikan hak dan kewajiban pajak kepada masyarakatnya (Senawi & Osmadi, 2023). Peran ini membuat kepala desa tidak hanya sebagai penyambung regulasi, tetapi juga sebagai komunikator moral dan teknis kebijakan pajak di tingkat akar rumput (Zulkifli et al., 2021).

Kepatuhan warga terhadap kewajiban PBB sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem perpajakan dipersepsi adil, manfaat nyata dari pajak dapat dirasakan langsung, dan proses komunikasinya berlangsung transparan dan partisipatif (Beerli et al., 2021; Abdullah et al., 2022). Di wilayah pedesaan, dimana interaksi sosial bersifat

lebih personal dan relasional, pendekatan persuasif dan edukatif dari figur pemimpin lokal seperti kepala desa terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran fiskal warga dibandingkan pendekatan koersif (Ahmadu & Nukpezah, 2022). Di sinilah kepala desa berperan sebagai katalis perubahan, yang melalui forum rapat desa, kegiatan keagamaan, maupun diskusi informal, dapat menjelaskan pentingnya pajak sebagai kewajiban moral sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan desa (Kusumastuti & Musa, 2023; Saptono & Mahmud, 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, beberapa penelitian mencatat tantangan serius yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan peran ini. Tidak sedikit kepala desa yang tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan teknis tentang aspek substantif perpajakan, sehingga sosialisasi PBB yang dilakukan seringkali bersifat normatif dan kurang efektif dalam menjawab kebingungan warga (Bradbury, 2022). Tidak hanya itu, persepsi negatif warga terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana pajak kerap menjadi alasan enggan membayar (Beerli et al., 2021; Abdullah et al., 2022). Dalam beberapa kasus, keterlibatan aktif kepala desa dalam sosialisasi PBB tetap belum cukup mengubah sikap warga yang sudah terbentuk karena minimnya pelayanan publik atau ketidakjelasan manfaat konkret dari pajak yang dibayarkan (Hernandi et al., 2025).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi peran kepala desa dan hasil aktual yang dicapai dalam peningkatan kepatuhan PBB. Literatur tentang perpajakan daerah sebagian besar masih terfokus pada kajian makro dan kuantitatif yang memotret pengaruh struktur pajak terhadap indikator fiskal dan ekonomi regional. Studi mikro yang secara eksplisit menelaah dinamika sosial, budaya, dan komunikasi pajak di tingkat desa, terutama dalam kaitannya dengan kepemimpinan lokal, masih terbatas (Ahmadu & Nukpezah, 2022; Krysovaty et al., 2022). Pemahaman atas konteks lokal, relasi sosial antar-aktor desa, dan bentuk komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi PBB merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pemungutan pajak di daerah terpencil dan marginal.

Salah satu konteks yang relevan untuk dianalisis adalah Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Berdasarkan data sekunder dan observasi lapangan, desa ini mengalami penurunan persentase realisasi PBB dari tahun ke tahun, meskipun nominal realisasi stagnan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa, salah satunya melakukan sejumlah langkah penyuluhan dan distribusi SPPT, namun belum disertai media visual seperti spanduk atau papan informasi yang dapat memperluas jangkauan sosialisasi. Warga menyatakan menerima informasi PBB hanya dari rapat desa atau saat kunjungan perangkat, sementara akses terhadap petugas pajak formal sangat terbatas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi PBB di Desa Nanga Wera masih bersifat insidental, informal, dan bergantung pada inisiatif individual perangkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peranan kepala desa dalam menyosialisasikan dasar pengenaan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat desa. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Nanga Wera dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggali persepsi, praktik, dan tantangan yang dihadapi kepala desa dalam mendorong kepatuhan fiskal warga. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi antara kepemimpinan lokal dan sistem pajak formal, serta penekanan pada dimensi komunikasi dan edukasi fiskal di level komunitas desa. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur tentang tata kelola fiskal lokal berbasis komunitas, sekaligus menyumbang rekomendasi kebijakan

yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam memperkuat sistem pemungutan pajak di desa-desa Indonesia.

KAJIAN TEORI

Peranan Kepala Desa dalam Pemerintahan Lokal

Dalam literatur administrasi publik dan pemerintahan lokal, peranan kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan, komunikasi publik, dan mobilisasi warga. Peran tersebut mencakup dimensi representatif, implementatif, dan mediasi antara kepentingan negara dan masyarakat lokal (Alvarez & Pennington-Cross, 2023). Peran kepala desa sering didefinisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan sosialnya dalam struktur pemerintahan desa, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai status yang dimiliki (Soeharto, 2002).

Peran merupakan bagian tugas utama sekaligus “pemain” dalam sistem sosial yang melaksanakan fungsi tertentu. Peran terdiri atas tiga komponen penting: konsep peran yang diyakini, harapan dari lingkungan sosial, dan pelaksanaan aktual. Ketika kepala desa menjalankan peran ini secara efektif, maka ia mampu menjembatani kebijakan publik dan kebutuhan komunitasnya (Storonyanska et al., 2023).

Dalam konteks perpajakan, kepala desa berperan sebagai penyambung informasi fiskal antara negara dan masyarakat. Mereka memiliki posisi strategis sebagai aktor yang dapat menjelaskan nilai penting dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menjadikannya bagian dari tanggung jawab bersama demi kemajuan desa (Maličká, 2021). Peranan ini diperkuat oleh kapasitas kepala desa dalam menyampaikan nilai dan norma melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, yang memudahkan penerimaan publik terhadap kebijakan fiskal.

Teori Kepatuhan Pajak dan Sosialisasi Fiskal

Beberapa teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku kepatuhan pajak terbentuk dalam konteks pemerintahan lokal. Pertama, **Social Contract Theory** menyatakan bahwa warga bersedia membayar pajak sebagai bagian dari kesepakatan tidak tertulis bahwa pemerintah akan menyediakan layanan publik sebagai timbal balik (Chen, 2022). Dalam kerangka ini, pajak bukan semata-mata kewajiban legal, melainkan juga perwujudan relasi timbal balik antara negara dan warga negara.

Kedua, **Theory of Planned Behavior (TPB)** menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap kewajiban pajak, norma sosial yang mendukung kepatuhan, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Gobey & Matikonis, 2019). Maka, keberhasilan sosialisasi fiskal bergantung pada sejauh mana pesan-pesan publik dapat mengubah persepsi dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Ketiga, pendekatan **Public Value Framework** menunjukkan bahwa kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Melalui nilai-nilai publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, mereka dapat mendorong warga untuk lebih patuh (Bischoff & Wimberger, 2023).

Sementara itu, sosialisasi fiskal dalam literatur didefinisikan sebagai proses internalisasi nilai-nilai perpajakan oleh masyarakat. Sosialisasi yang baik dapat mengubah pandangan individu dari ketidaktauan atau ketidakpedulian menjadi pemahaman dan kepatuhan. Dalam konteks desa, sosialisasi melalui pendekatan

informal seperti rapat, pengajian, atau diskusi bersama tokoh masyarakat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan pajak yang relevan.

Strategi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas pemungutan PBB diukur dari sejauh mana target penerimaan pajak tercapai sesuai dengan potensi objek dan subjek pajak yang ada di wilayah tersebut. Efektivitas organisasi publik termasuk sistem pemungutan pajak tergantung pada tiga faktor: pencapaian tujuan, keterpaduan sistem, dan perilaku manusia dalam organisasi. Dalam hal ini, aparat desa berperan penting dalam memastikan proses pemungutan berjalan optimal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengadopsi tiga pendekatan, yaitu **Official Assessment**, **Self Assessment**, dan **Withholding System** (Mardiasmo, 1997). Sistem yang digunakan dalam PBB sebagian besar bersifat official assessment, di mana pemerintah menetapkan besaran pajak yang harus dibayar. Namun dalam praktiknya, efektivitas sistem ini masih tergantung pada keakuratan data objek pajak dan kesadaran masyarakat untuk membayar.

Sarana dan petugas pemungut pajak juga menjadi variabel penting. Keterbatasan dalam fasilitas administrasi, pengolahan dokumen, hingga pengawasan teknis, sering kali menjadi hambatan utama dalam pemungutan PBB di desa (LAN, 1994). Oleh karena itu, pengawasan internal desa untuk memastikan keakuratan data dan ketaatan prosedural menjadi sangat penting dalam menjamin penerimaan PBB.

Di sisi lain, keberhasilan pemungutan sangat ditentukan oleh sinergi antara perangkat desa dan warga. Ketika kepala desa memiliki strategi penyuluhan dan pendekatan komunikasi yang efektif, maka akan tercipta kesadaran kolektif bahwa PBB adalah kontribusi penting bagi pembangunan lokal.

Komunikasi Fiskal dan Kepatuhan Wajib Pajak

Komunikasi publik dalam konteks perpajakan menjadi sarana penting untuk membentuk pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Beerli et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan yang partisipatif dan edukatif dalam menyampaikan informasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Misalnya, penggunaan media visual seperti spanduk, papan informasi, atau forum diskusi terbuka terbukti memperkuat pesan fiskal dan menjangkau berbagai segmen masyarakat.

Abdullah et al. (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik yang dirasakan warga juga berpengaruh pada kemauan mereka untuk membayar pajak. Jika warga melihat pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas desa yang nyata, maka kemungkinan besar mereka akan lebih kooperatif dalam membayar PBB.

Strategi edukatif seperti penyuluhan langsung, simulasi manfaat pajak, atau kampanye sosial menjadi elemen penting dari proses sosialisasi. Elliott (2022) menambahkan bahwa melalui forum komunitas dan pelatihan terpadu, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban fiskal dapat meningkat signifikan.

Namun demikian, rendahnya literasi fiskal dan ketidakpahaman teknis tentang mekanisme PBB sering menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kepala desa harus mengambil peran sebagai fasilitator literasi fiskal dengan menyampaikan informasi dalam bahasa lokal yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks warga desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam peranan kepala desa dalam penyuluhan dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan fenomena sosial dan kepemimpinan publik yang kompleks, serta memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap dinamika lokal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif (Creswell, 2014; Yin, 2011). Studi kualitatif deskriptif banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik untuk mengungkap persepsi, pemaknaan, dan praktik sosial aktor lokal dalam konteks kebijakan fiskal, seperti dalam studi-studi serupa di bidang pengelolaan pajak desa (Al'libani et al., 2024; Hamzah et al., 2023).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa dalam konteks pelaksanaan kebijakan fiskal lokal, dengan fokus pada strategi sosialisasi, komunikasi publik, dan edukasi wajib pajak terkait PBB. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan pengetahuan, posisi strategis, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pemungutan PBB (Ummah & Choiriyah, 2023; Eprilianto et al., 2023). Informan yang diwawancarai antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, perangkat desa yang terkait dengan urusan pajak, serta beberapa warga yang menjadi wajib pajak aktif maupun pasif. Teknik pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan keberagaman perspektif yang relevan dan otentik, sesuai dengan karakteristik sosial desa yang plural dan berlapis.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi administratif desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberi ruang bagi eksplorasi narasi pengalaman dan persepsi subjektif dari informan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator konseptual dari peran kepala desa, efektivitas komunikasi fiskal, dan tingkat keterlibatan warga dalam sosialisasi pajak. Observasi dilakukan dengan mencermati proses distribusi SPPT, interaksi langsung antara aparat desa dan warga dalam forum desa, serta keberadaan media informasi fiskal seperti spanduk, papan informasi, atau selebaran pajak. Dokumentasi yang dikaji meliputi data realisasi PBB dari tahun 2019 hingga 2024, salinan surat edaran pajak, berita acara rapat desa, serta agenda musyawarah desa yang berkaitan dengan urusan keuangan publik.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis menggunakan pendekatan *thematic analysis*, yaitu dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan tema kunci dalam narasi dan dokumen yang tersedia (Braun & Clarke, 2006; Indratno et al., 2024). Tahapan analisis dilakukan secara berjenjang, dimulai dari *open coding* untuk mengenali fragmen penting, *axial coding* untuk membangun hubungan antar konsep, dan *selective coding* untuk menyusun temuan utama dalam kerangka interpretatif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana peran kepala desa dijalankan, tantangan yang dihadapi dalam komunikasi pajak, dan bagaimana warga menanggapi sosialisasi tersebut dalam konteks lokal. Sebagian data dokumentasi dianalisis menggunakan *content analysis* untuk menggali makna tersirat dari teks kebijakan dan komunikasi publik yang digunakan dalam penyuluhan fiskal (Taffon et al., 2018; Widiyaningrum & Riaji, 2023).

Agar validitas data terjaga, peneliti menerapkan empat kriteria validitas naturalistik sebagaimana dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta *member checking*, yakni dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi wawancara kepada informan utama. *Transferability* dijaga

melalui deskripsi konteks sosial dan budaya desa secara rinci agar pembaca dapat menilai keterpindahannya ke konteks lain yang relevan. *Dependability* ditingkatkan melalui pencatatan sistematis prosedur penelitian dan audit trail yang memungkinkan peninjauan ulang terhadap proses pengambilan keputusan selama penelitian. Sedangkan *confirmability* dipastikan dengan menjaga objektivitas analisis dan menghindari bias interpretatif melalui diskusi temuan dengan rekan sejawat dan pembimbing metodologi.

Terkait dengan etika penelitian, peneliti menjunjung tinggi prinsip *informed consent*, *anonymity*, dan *confidentiality*. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan pun. Nama dan identitas informan disamarkan dengan kode khusus untuk menjaga kerahasiaan data. Peneliti juga menghindari pertanyaan yang bersifat mengganggu atau memicu trauma, serta tidak memaksakan pendapat dalam interpretasi data. Etika lokal juga diperhatikan, seperti izin kepada tokoh adat sebelum melakukan observasi dan wawancara, serta penggunaan bahasa yang sopan dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nanga Wera merupakan mekanisme utama dalam menyampaikan informasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat. Penyuluhan ini berlangsung melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal, seperti rapat desa, kegiatan gotong royong, pengajian, serta koordinasi internal dengan perangkat desa. Pola ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan desa berfungsi sebagai simpul komunikasi fiskal utama di tingkat lokal, terutama dalam konteks pedesaan dengan keterbatasan kehadiran aparat pajak supradesa.

Secara empiris, pendekatan penyuluhan tersebut berkontribusi pada terbentuknya kesadaran normatif warga mengenai kewajiban membayar PBB. Berdasarkan data kuantitatif realisasi PBB periode 2019–2024 menunjukkan bahwa meskipun nilai nominal penerimaan relatif stabil, persentase capaian terhadap target justru mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyuluhan yang ada belum cukup efektif untuk mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, penyuluhan berhasil menciptakan *awareness*, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi perilaku kepatuhan fiskal yang konsisten.

Temuan ini sejalan dengan literatur administrasi publik yang menempatkan kepala desa sebagai aktor strategis dalam proses sosialisasi kebijakan publik, khususnya di wilayah pedesaan (Soeharto, 2002). Dalam perspektif teori peran, kepala desa menjalankan aspek dinamis dari kedudukannya ketika secara aktif menyampaikan pesan-pesan fiskal kepada warga. Dalam penerapannya, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kesesuaian antara konsep peran yang dipahami kepala desa, harapan masyarakat, dan pelaksanaan nyata di lapangan.

Penyuluhan merupakan bagian dari proses sosialisasi nilai dan norma perpajakan, yaitu mekanisme pembelajaran sosial yang bertujuan menginternalisasikan kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Ketika sosialisasi tidak dilakukan secara sistematis, berulang, dan didukung

media yang memadai, maka potensi terjadinya perlawanan pajak pasif akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman menjadi lebih besar.

Penyuluhan berbasis kepemimpinan personal perlu ditransformasikan menjadi mekanisme kelembagaan yang lebih terstruktur. Tanpa standar materi, media pendukung, dan evaluasi berkala, efektivitas penyuluhan sangat bergantung pada kapasitas individu kepala desa, sehingga rentan terhadap fluktuasi kinerja dan keberlanjutan program. Indikator tersebut menjelaskan mengapa kesadaran PBB di Desa Nanga Wera belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kepatuhan yang optimal.

Diskusi Kepala Desa dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diskusi antara kepala desa, tokoh masyarakat, dan wajib pajak berlangsung secara sporadis dan belum terinstitusionalisasi. Diskusi biasanya terjadi dalam forum rapat desa atau pertemuan informal, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial. Meskipun diskusi ini membuka ruang dialog, intensitas dan kedalamannya belum merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang secara sosial atau ekonomi berada pada posisi rentan.

Dalam perspektif governance partisipatif, pelibatan tokoh masyarakat dalam diskusi kebijakan publik merupakan strategi penting untuk membangun legitimasi dan memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan (Soeharto, 2002). Tokoh lokal berperan sebagai *opinion leader* yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku warga terhadap kebijakan pajak. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum dioptimalkan secara sistematis.

Berbagai sumber dalam administrasi publik menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan fiskal tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan. Dalam konteks PBB, diskusi yang mendalam mengenai manfaat pajak, mekanisme perhitungan, dan penggunaan dana dapat meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme internalisasi nilai, bukan semata-mata karena tekanan administratif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi PBB di Desa Nanga Wera masih lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Warga lebih banyak menerima informasi satu arah, sementara ruang untuk klarifikasi teknis dan ekspresi keberatan relatif terbatas. Hal ini berpotensi mempertahankan kesenjangan informasi, terutama terkait pemahaman dasar pengenalan dan cara penghitungan PBB.

Perlunya penguatan forum diskusi yang bersifat reguler dan inklusif menjadi salah satu temuan dari penelitian ini. Diskusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi persepsi dan pembangunan kepercayaan. Tanpa diskusi yang memadai, risiko ketidakpercayaan dan resistensi sosial terhadap pajak tetap tinggi, khususnya di desa dengan struktur sosial yang heterogen.

Ketiadaan Informasi Langsung dari Aparat Pajak dan Beban Edukasi pada Pemerintah Desa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah tidak adanya informasi langsung dari aparat pajak di luar pemerintah desa kepada wajib pajak di Desa Nanga Wera. Ketiadaan ini menyebabkan beban edukasi perpajakan sepenuhnya ditanggung oleh aparatur desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebingungan masyarakat terkait aspek teknis PBB, termasuk perubahan nilai pajak dan prosedur administrasi.

Peran aparat pajak formal dipandang krusial dalam mendukung sistem pemungutan, terutama pada sistem *official assessment* yang menuntut keakuratan data dan pemahaman wajib pajak (Mardiasmo, 1997). Ketika peran ini tidak hadir di tingkat desa, maka terjadi *institutional gap* yang menggeser fungsi teknokratis ke aktor lokal yang tidak selalu memiliki kapasitas memadai.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi vertikal antara pemerintah desa dan otoritas pajak daerah. Pengawasan dan pembinaan merupakan fungsi penting pimpinan untuk menjamin kebijakan berjalan sesuai rencana. Ketiadaan pendampingan teknis dari otoritas pajak menunjukkan bahwa fungsi pembinaan belum berjalan optimal.

Implikasinya, kepala desa diposisikan tidak hanya sebagai komunikator kebijakan, tetapi juga sebagai *problem solver* teknis perpajakan. Konsep tersebut, menghindari risiko kesalahan informasi, menurunkan kualitas layanan pajak, sehingga berdampak pada melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Pada akhirnya, efektivitas pemungutan PBB tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas desa, tetapi memerlukan dukungan kelembagaan lintas level pemerintahan.

Ketiadaan Media Visual dan Implikasi terhadap Efektivitas Sosialisasi PBB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat media visual seperti spanduk atau papan informasi PBB di ruang publik Desa Nanga Wera. Sosialisasi PBB sepenuhnya bergantung pada komunikasi lisan yang dilakukan oleh aparat desa. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jangkauan informasi, terutama bagi warga yang jarang mengikuti rapat atau kegiatan desa.

Media visual berfungsi sebagai penguat pesan (*message reinforcement*) yang membantu mempercepat pemahaman dan memperluas jangkauan sosialisasi. Ketidakhadiran media visual menunjukkan adanya kesenjangan antara rekomendasi teoritis dan praktik sosialisasi fiskal di tingkat desa. Sedangkan, media visual relatif murah, mudah diakses, dan dapat menjangkau masyarakat secara berkelanjutan tanpa kehadiran fisik aparat.

Sosialisasi yang efektif harus mampu menjelaskan kewajiban pajak secara sederhana dan berulang. Ketika informasi hanya disampaikan secara lisan, risiko distorsi pesan dan lupa menjadi lebih besar, terutama di masyarakat dengan tingkat literasi fiskal yang beragam.

Media tersebut tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga simbolik, yaitu menegaskan bahwa PBB merupakan agenda bersama pemerintah dan masyarakat. Tanpa simbol-simbol visual yang konsisten, pesan pajak cenderung dipersepsi sebagai isu administratif sementara, bukan kewajiban kolektif yang berkelanjutan. Integrasi media visual dalam strategi sosialisasi PBB merupakan tahapan yang sangat krusial dalam melaksanakan penyuluhan.

Peran kepala desa dalam sosialisasi PBB di Desa Nanga Wera bersifat signifikan namun belum optimal. Kepala desa telah menjalankan fungsi komunikasi, fasilitasi, dan koordinasi sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin lokal (Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa, 1988; Soeharto, 2002). Keterbatasan kapasitas administratif, ketiadaan dukungan teknis dari aparat pajak, serta minimnya sarana sosialisasi menyebabkan efektivitas peran tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan PBB secara konsisten.

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual wajib pajak, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan komunikasi kebijakan di tingkat lokal. Penguatan peran kepala desa perlu ditempatkan dalam kerangka sistemik yang

melibatkan reformasi administrasi, koordinasi lintas institusi, dan inovasi sosialisasi. Kegiatan berikutnya yang harus ditempuh oleh pemerintah Desa Nanga Wera yaitu dengan melaksanakan penguatan kapasitas kepemimpinan desa, perbaikan mekanisme sosialisasi, serta integrasi peran pemerintah desa dan otoritas pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan PBB di wilayah perdesaan.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Nanga Wera Kabupaten Bima sangat krusial, namun belum optimal. Kepala desa berfungsi sebagai aktor sentral dalam penyuluhan, diskusi publik, dan mediasi informasi fiskal, menggantikan fungsi teknis yang seharusnya diemban oleh aparat pajak formal. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum seperti rapat desa, pengajian, dan gotong royong, namun pelaksanaannya masih bersifat personal dan belum didukung oleh sistem komunikasi pajak yang standar.

Temuan menunjukkan bahwa diskusi antara kepala desa dan masyarakat turut membangun literasi pajak berbasis komunitas, meskipun masih terbatas pada kelompok tertentu. Ketidakhadiran petugas pajak formal di desa memperkuat beban informasional pada aparatur desa, memperlihatkan adanya kesenjangan struktural dalam sistem penyuluhan pajak. Media komunikasi visual seperti billboard atau spanduk belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat sosialisasi.

Kepala desa sangat penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi fiskal, membangun kemitraan sinergis antara desa dan otoritas pajak, serta menghadirkan inovasi media sosialisasi yang kontekstual dengan budaya lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan literatur administrasi publik dan pajak desa, khususnya pada aspek kepemimpinan lokal dan strategi penyuluhan di masyarakat agraris. Untuk pengembangan studi lebih lanjut, disarankan penelitian dengan pendekatan komparatif antar desa, serta evaluasi efektivitas media sosial dan teknologi digital sebagai alternatif edukasi fiskal di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Wahab, M. R. A., Razak, A. A., & Hanafi, M. H. (2022). Property Taxation: The Encouraging Factors for Payment Among the Taxpayers. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 28(1), 22–44. <https://doi.org/10.1108/jfmpc-07-2021-0042>
- Ahmadu, A. S., & Nukpezah, J. A. (2022). Disasters, Jurisdictional Vulnerability, and Local Tax Revenues. *Public Administration Quarterly*, 46(2), 129–154. <https://doi.org/10.37808/paq.46.2.3>
- Al'libani, R. R., Prayoga, I. A., & Mulyana, A. (2024). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kerja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay. *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/10.31004/riggs.v3i3.1535>
- Alvarez, S. G., & Pennington-Cross, A. (2023). Heterogeneity in Property Tax Capitalization: Evidence From Municipalities in Wisconsin. *Real Estate Economics*, 51(5), 1285–1314. <https://doi.org/10.1111/1540-6229.12430>
- Beeri, I., Zaidan, A., & Zeedan, R. (2021). Willingness to Pay Taxes Through Mutual Trust: The Effect of Fairness, Governability, Tax-Enforcement, and

- Outsourcing on Local Tax Collection Rates. *Governance*, 35(4), 1229–1252. <https://doi.org/10.1111/gove.12662>
- Bischoff, I., & Wimberger, A. (2023). Local Land Taxes and Social Media Adoption in Local Governments: Evidence From the German State of Hesse. *Journal of Public Finance and Public Choice*, 38(2), 234–262. <https://doi.org/10.1332/251569121x16801683769931>
- Bradbury, J. C. (2022). Does Hosting a Professional Sports Team Benefit the Local Community? Evidence From Property Assessments. *Economics of Governance*, 23(3–4), 219–252. <https://doi.org/10.1007/s10101-022-00268-z>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Chen, X. (2022). How Does Local Autonomy Shape the Revenues of Small Municipalities? Evidence From Illinois Home Rule Municipalities. *Chinese Public Administration Review*, 13(1–2), 75–86. <https://doi.org/10.1177/15396754221104381>
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Determinants of Compliance Property Taxpayers: Analysis With Structural Equation Model. (2021). *Qas*, 22(185). <https://doi.org/10.47750/qas/22.185.11>
- Elliott, C. (2022). Taxation and Accountability in Local Government: A Democratic Deficit in Andhra Pradesh. *Studies in Indian Politics*, 10(2), 201–213. <https://doi.org/10.1177/23210230221135826>
- Eprilianto, D., Sari, Y. K., Ma'ruf, M., Pradana, G., Lasmijan, & Febrianti, E. (2023). Village Community Empowerment Through Sustainable Food Program in Realizing Sustainable Agriculture. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1275(1), 012022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1275/1/012022>
- Febriyani, A. (2025). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran PBB : Perspektif Sosial Dan Budaya. *Jupiekas*, 3(3), 64–70. <https://doi.org/10.59059/jupiekas.v3i3.2584>
- Gobey, M., & Matikonis, K. (2019). Small Business Property Tax Reductions and Job Growth. *Small Business Economics*, 56(1), 277–292. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00219-9>
- Hamzah, A., Rahayu, A. L., Khaerunnisa, H. F., Riska, R., & Aulia, D. H. (2023). Factors Affecting Community Participation in Paying Land and Building Tax in Kuningan Regency. *Jambura Equilibrium Journal*, 5(1), 9–16. <https://doi.org/10.37479/jej.v5i1.16887>
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
- Hernandi, A., Meilano, I., Saptari, A. Y., Suwardhi, D., Abdulharis, R., Handayani, A. P., Nurmaulia, S. L., Putri, N., Widyastuti, R., Merdekawati, P., & Cahyani, F. N. (2025). Fair Taxes, Better Revenue: A Case Study on Spatial Approaches to Land Taxation in Lebak Regency, Indonesia. *Land*, 14(1), 125. <https://doi.org/10.3390/land14010125>
- Indratno, I., Ferbiyandani, M. R., Pratama, A., & Jannah, M. R. (2024). Assessment of the Cultural Landscape Identity for Rawabogo Tourism Village Development in Bandung Regency – Indonesia. *Evergreen*, 11(2), 1089–1102. <https://doi.org/10.5109/7183411>
- Krysovatty, A., Desyatnyuk, O., & Tkachyk, F. (2022). Theoretical Logos of Fiscal Decentralization in the Conditions of Permanent Transformation of Interbudgetary Relations. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2(43), 63–70. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3630>

- Kusumastuti, D., & Musa, H. G. (2023). Enhancing Local Revenue With Land and Construction Tax Incentives: Fair and Balanced Tax Approaches. *Jlej*, 1(3), 170–184. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i3.11>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Maličká, L. (2021). Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation. *Ekonomický Časopis*, 69(7), 669–686. <https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.01>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2023). Stimulus or Enforcement? How Intergovernmental Transfers Crowd-in Local Taxes in Indonesia. *Public Finance Review*, 51(6), 782–837. <https://doi.org/10.1177/10911421231191961>
- Senawi, A., & Osmadi, A. (2023). Property Tax Reassessment Among Local Authorities: The Implementation and Its Key Challenges. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 29(1), 152–167. <https://doi.org/10.1108/jfmpc-04-2022-0022>
- Senawi, A., Osmadi, A., & Nor Azalina Yusnita Abd Rahman. (2022). Evaluating Determinants of Property Tax Reassessment: Malaysian Practitioners' Preliminary Observations. *Planning Malaysia*, 20. <https://doi.org/10.21837/pm.v20i21.1118>
- Storonyanska, I., Patytska, K., Medynska, T., Benovska, L., Kliuchnyk, L., & Nestor, O. Y. (2023). Systemic Prerequisites for Shaping the Local Budgets' Tax Revenue: The Case Study of Developed Countries. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 6(53), 58–69. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.53.2023.4204>
- Taffon, P., Rossi, G., Kindermans, J.-M., Bergh, R. V. d., Nguon, C., Debackere, M., Vernaëve, L., Smet, M. D., & Venables, E. (2018). 'I Could Not Join Because I Had to Work for Pay': A Qualitative Evaluation of Falciparum Malaria Pro-Active Case Detection in Three Rural Cambodian Villages. *Plos One*, 13(4), e0195809. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195809>
- Ummah, K., & Choiriyah, I. U. (2023). Implementation of E-Government Through the Sidoarjo Regency Electronic Office Manuscript Application (E-Buddy) (Case Study in Kajeksan Village Government, Tulangan District, Sidoarjo Regency). *Birvi*. <https://doi.org/10.33258/birci.v6i1.7494>
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. The Guilford Press.
- Zulkifli, N. A. A., Azis, S. S. A., Saliman, N. S. S., & Maimun, N. H. A. (2021). Factors Causing Failure in Completing Reassessment Work Among Appointed Valuation Firms. *Planning Malaysia*, 19. <https://doi.org/10.21837/pm.v19i17.992>